



Perlu Penanganan Serius

TERKAIT banjir yang merendam sejumlah titik di dalam Kota Ketapang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Ketapang, menegaskan jika banjir tersebut terjadi akibat adanya wilayah permukiman yang tidak memiliki saluran drainase. Sedangkan mengenai proyek normalisasi saluran drainase senilai Rp1,7 miliar, diakui Dinas PUTR sudah sesuai RAB.

Kabid Sumber Daya Air (SDA) Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Ketapang, Lalu Heru Prihatiandi, memastikan, proyek drainase di dalam kota dengan nilai pagu Rp1,7 miliar sudah sesuai rencana. Dana tersebut digunakan mereka untuk sejumlah item pekerjaan. Di antaranya, sebut dia, pekerjaan normalisasi saluran sepanjang 18.800 meter yang menyebar di wilayah Kota Ketapang. Pihaknya telah turun ke lapangan guna mengecek kondisi banjir yang masih terjadi di beberapa titik di Kota Ketapang. "Setelah kita kroscek, ternyata drainasenya tidak ada, sehingga airnya tidak mengalir. Ditambah rumah warga berada di bawah badan jalan, sehingga air yang tergenang ini menyebabkan banjir," katanya, kemarin (27/11).

Dia menjelaskan, penanganan pembangunan drainase bukan berada di bidang SDA PUTR. Di tahun 2019 pihaknya fokus pada program penanggulangan banjir berupa normalisasi saluran. Sekitar 18.800 meter saluran yang dinormalisasikan mereka dan lokasinya menyebar di Kota Ketapang. "Kita memang belum bisa mengakomodir semua titik, termasuk wilayah padat penduduk yang belum memiliki drainase tersebut," jelasnya. Pagu anggarannya Rp1,7 miliar dengan item pekerjaan, digambarkan dia, terbagi beberapa item dan di sejumlah titik. Selain pembersihan saluran, dia menyebutkan juga ada pengerjaan turab beton sepanjang 435 meter, dan 150 meter di dua lokasi yang langsung menuju sungai. Sedangkan terkait pelaksanaan normalisasi saluran yang dikerjakan secara manual, diakuiinya sesuai dengan perencanaan. Pasalnya lokasi-lokasi yang akan dinormalisasikan mereka berada di saluran permukiman padat penduduk, sehingga tidak memungkinkan untuk menggunakan alat berat. "Kalau menggunakan alat berat pekerjaan malah bisa merusak aset daerah seperti barau belian, barau beton, dan bisa merusak bangunan warga, karena lokasi-lokasi normalisasi banyak terdapat bangunan permanen warga ditengah saluran yang ada," tuturnya. Untuk menanggulangi persoalan banjir di dalam kota, menurutnya, perlu penanganan secara terintegrasi yang melingkupi semua bidang di OPD terkait. Sehingga, harapan dia, nantinya bisa mengatasi persoalan yang ada saat ini. Selain itu, persoalan pembuangan sampah sembarangan, diakui dia, juga menjadi satu penyebab tersumbatnya saluran drainase yang ada di Kota Ketapang. "Kita berharap ada Perda yang mengatur persoalan sampah dan bangunan di sekitar saluran agar nantinya permasalahan banjir dan saluran bisa teratasi," harapnya. (afi)